

9

ARTIKEL PENELITIAN  
DANA RUTIN 2000  
KONTRAK NO. 01/ RUTIN/ VI/ 2000

**GERAKAN SOSIAL DI RESIDENSI JAMBI  
PADA AWAL ABAD XX**

Oleh :

Drs. Furwo Husodo, M. Hum  
Setyaningsih  
Dra. Lindayanti, M. Hum

(Ketua)  
(Anggota)  
(Pembimbing)

**JURUSAN SEJARAH FAKULTAS SASTRA**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2000.

## GERAKAN SOSIAL DI RESIDENSI JAMBI PADA AWAL ABAD XX

In the dawn of the twentieth century social movements in Jambi arose. And this research will describe this social movement, that happened in 1916. This movement was as messianic movement as that happened in Java at the same period. This social movement have 3 causal factor : politics, economy and social.

Before it by 1910 in Sarolangun and Muara Tembesi have accorded a resistance movement to the colonial government, the pioneer was Alam Bidar. There after in 1914 it happened too in Bangko with his leader was kademang Ali.

The wider and the bigger movement in Jambi happened by 1916 under the leadership of H. Agoes. Previously, in 1914 Sarekat Islam was founded in Jambi. In rural area Si grew as Sarekat Abang that was more radical.

### PENDAHULUAN

Selama periode penjajahan Belanda, Banyak sekali perlawanan yang sangat keras dan gerakan-gerakan protes yang terus menerus melawan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat biasa. Dalam abad ke-19 sampai permulaan abad ke-20, pemberontakan rakyat muncul terus menerus, yang sebagian besar diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial keagamaan.

Gerakan-gerakan sosial yang bercorak keagamaan ini, biasanya juga merupakan gerakan kebatinan secara umum yang mempunyai tujuan untuk menolak keadaan yang ada di lingkungan masyarakat dan mengharapkan suatu kondisi yang lebih baik dari keadaan pada saat itu. Gerakan ini melibatkan kelompok-kelompok anggota masyarakat sehingga dapat disebut juga sebagai gerakan sosial. Oleh karena dalam gerakan tersebut pada dasarnya mengharapkan datangnya Ratu adil, maka sering disebut juga sebagai gerakan Ratu Adil. (Purwo Husodo, 1999:33) sehingga pada prinsipnya, kegiatan gerakan-gerakan sosial keagamaan ini merupakan suatu proses adaptasi antara manusia dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial.

Hal ini terjadi, ketika penetrasi kolonial Belanda secara terus menerus menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat biasa melalui pajak yang berat, pengerahan tenaga buruh yang berlebih-lebihan dan peraturan yang menindas, pada umumnya dirasakan bahwa realitas kekuasaan kolonial tidaklah cocok dengan realitas sosial yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Sehingga muncul dua realitas berbeda yang saling tolak belakang. Akhirnya ideologi ratu adil atau nativisme

dianut oleh rakyat karena unsur-unsurnya yang tertentu mendukung kepentingan mereka. Mereka bersama-sama menafsirkan melalui mitos sebagai pengesahan dan pengakuan. (Sartono Kartodirjo dalam *Prisma*, 1984:4)

Kedatangan kolonial Belanda telah menciptakan suatu krisis dengan mengancam stabilitas tatanan masyarakat di segala bidang dan munculnya tatanan baru telah mengikis pranata-pranata sosial yang telah mapan. Untuk itu mereka membangun suatu universe of meaning, yaitu adanya kedudukan tertinggi dari alam pikiran yang penuh makna, sebagai mitos Ratu Adil.

Ideologi Ratu Adil biasanya diproklamirkan oleh Ratu Adil itu sendiri yang selalu mengklaim bahwa dirinya telah menerima wahyu. Mitos tentang Ratu Adil sampai sekarang ini terdapat banyak versi, baik yang tercantum dalam tulisan-tulisan maupun yang masih merupakan tradisi lisan seperti ramalan Jayabaya. Versi-versi tersebut menunjukkan berbagai ragam variasi, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu ramalan akan kedatangan Ratu Adil.

Dalam banyak kasus, ideologi seperti yang ditampilkan dalam ramalan-ramalan gerakan Ratu Adil menunjukkan adanya penekanan mengenai anti asing dan anti kolonial. Suatu fakta yang menonjol bahwa ramalan-ramalan yang diproklamirkan oleh pemimpin-pemimpin gerakan Ratu Adil adalah bertujuan untuk suatu pemberontakan terhadap kolonial Belanda.

Fakta-fakta sejarah telah membuktikan pada awal abad ke-20 berkali-kali telah terjadi adanya gerakan Ratu Adil di berbagai tempat. Gerakan Mas Malangyuda di Rajawana Kidul (1870) dan gerakan Kyai Nurhakim dari Pasir Wetan (1870) misalnya, sangat berpengaruh di kalangan masyarakat setempat. Kyai Nurhakim sendiri berniat membinasakan orang-orang Eropa dan orang-orang pribumi yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kyai Nurhakim telah memproklamirkan dirinya sebagai sultan Imam Mahdi dan akhirnya ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Peristiwa-peristiwa lain seperti peristiwa Bedugan (1904) dan peristiwa Tombakmerang (1935) menunjukkan fakta-fakta sejarah adanya gerakan Ratu Adil di Jawa pada awal abad ke-20. (Sartono Kartodirjo, 1984:72).

Gerakan-gerakan tersebut secara terus terang bermusuhan dengan kaum kafir (orang-orang Eropa) kemudian mendakwahkan perang suci dan ingin menodhayahkan kaum kafir dari bumi Indonesia. Ide perang suci tersebut terus diserukan kepada rakyat dengan tujuan untuk mengusir orang kulit putih. Di samping itu gerakan-gerakan tersebut pada umumnya hendak mengangkat senjata untuk mengusir penjajah, kemudian ada orang yang merasa terpanggil untuk memimpin gerakan yang bersifat lokal atau kedaerahan. Diantaranya ada pula yang mengangkat dirinya sebagai Ratu Adil atau Imam Mahdi. Pemimpin-pemimpin tersebut mengaku memperoleh pesan, ilham atau

wahyu. Setelah menerima wahyu, mereka mulai menyebarkan ajaran-ajarannya, kemudian mulai menjalankan peranan sebagai Ratu Adil untuk memberikan ajaran-ajaran kepada para pengikutnya. (Sartono Kartodirjo, 1984:13)

Watak-watak dari gerakan Ratu Adil yang menonjol, yaitu adanya persamaan, keseragaman dan ketiadaan harta. Mereka yang percaya sepenuhnya mengharapkan datangnya Zaman adil makmur yang akan menciptakan keadaan dan rasa persatuan, penyamarataan tingkat status dari seluruh anggota masyarakat, kepatuhan terhadap pemimpin dan bersedia untuk mempertahankan kepercayaan mereka. (Sartono Kartodirjo dalam Prisma, 1984:8). Namun untuk mencapai masyarakat yang diidamkan tersebut, mereka percaya akan mengalami masa keonaran yaitu masa perubahan besar.

Fakta-fakta sejarah munculnya gerakan Ratu Adil tidak hanya terjadi di Jawa. Namun ternyata di luar Jawa pada awal abad ke-20, muncul gerakan Ratu Adil seperti gerakan sosial di Jambi yang dipelopori oleh Haji Agoes di Muara Tembesi pada tahun 1916, sebagai ketua cabang Sarekat Islam dan Alam Bider, yang menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi, kemudian di Palembang terkenal dengan peristiwa Glambit.

Konsep Ratu Adil atau Imam Mahdi telah memainkan peranan yang sangat penting dalam gerakan sosial di Jambi pada tahun 1916. Gerakan ini hampir sama dengan gerakan Ratu Adil yang ada di Jawa, yaitu adanya ide Ratu Adil, nativisme dan perang jihad untuk mengusir penjajah dengan harapan dapat mencapai kehidupan yang baik seperti sebelum kedatangan orang kulit putih. Unsur ini di perkuat dengan perang suci sehingga menambah solidaritas diantara anggota dalam gerakan tersebut. (Wijk, 1979:50). Disamping itu gerakan ini mempunyai dua tradisi, yaitu tradisi tentang kedatangan Ratu Adil dan tentang Imam Mahdi. Ratu Adil merupakan tradisi dari Hindustan, sementara Imam Mahdi adalah tradisi dari Islam. Dua tradisi mesianis pada awal abad ke-20 saling berkaitan erat yang susah dipisahkan karena antara gerakan Ratu Adil dan Imam Mahdi adalah sejalan. (Wijk, 1979:49)

Sementara itu di Palembang pada tahun 1916 muncul gerakan sosial yang terkenal dengan peristiwa Glambit. Glambit merupakan nama samaran dari Muhamad Amin yang memimpin Sarekat Abang (SA). Oleh karena Glambit perannya sebagai tokoh utama dalam gerakan Sarekat Abang maka penduduk setempat seringkali juga menyebut dengan peristiwa atau perang Glambit.

Peristiwa di residensi Palembang ini ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di residensi Jambi, yaitu dimulai dari Muara Tembesi menuju distrik Rawas yang dipelopori oleh organisasi Sarekat Islam (SI). Gerakan sosial di kedua residensi ini diorganisir oleh sekelompok orang-orang SI yang menamakan diri mereka sebagai Sarekat Abang (SA). Pengikut SA ini sering berkumpul dengan pakaian destar

berwarna "abang" (merah) dan kemudian mengadakan pengajian agama yang disertai dengan ajaran mistik, disamping itu juga latihan bela diri. (Mesika Zed, 1991:115). Namun demikian pengurus SI Palembang menolak dengan tegas bahwa SI tidak pernah mengenal "onderbouw"-nya yang bernama SA karena ajaran-ajaran SA bukanlah doktrin dari SI. Oleh karena itu apapun alasannya, terlibat atau tidak, kenyataannya pihak penguasa kolonial terus melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pengurusnya, bukan hanya di Rawas tetapi juga di tempat lain.

Kalau dilihat ide gerakan Ratu Adil di luar Jawa tidak nampak dan biasanya terjadi di Jawa saja. Namun pada awal abad ke-20, ide gerakan Ratu Adil cukup berkembang di luar Jawa, terutama di residensi Jambi dan Palembang. Permasalahannya yang timbul adalah mungkinkah karena pada awal abad ke-20 terpengaruh oleh tradisi dan kepercayaan orang Jawa tentang ratu adil atau karena pengaruh dari organisasi Sarekat Islam (SI) yang dipelopori oleh H.D.S Tjokroaminoto dan raden Gunawan. Pemimpin-pemimpin tersebut di residensi Jambi dan Palembang dianggap sebagai wali Imam Mahdi yang telah memberikan semangat pergerakannya dan juga menggunakan ideologi Ratu Adil. Meskipun Tjokroaminoto sendiri menolak bahwa dirinya seorang Ratu Adil.

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan peristiwa-peristiwa gerakan Ratu Adil pada awal abad ke-20 di residensi Jambi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pola-pola yang diterapkan dalam gerakan Ratu Adil di Jawa dengan gerakan sosial yang terjadi di residensi Jambi dan faktor-faktor yang mendorong munculnya gerakan tersebut, serta mempelajari kronologi kejadian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Penelitian mengenai gerakan Ratu Adil ini sampai sekarang masih sangat sedikit, meskipun gerakan tersebut sudah terjadi pada abad ke-19 dan 20. Dalam penelitian tentang gerakan Ratu Adil di Indonesia pada awal abad ke-20 ini telah dilakukan penelitian awal mengenai gerakan Ratu Adil di Indonesia pada Abad ke-19 dan 20 (1999) oleh Purwo Husodo, meskipun penelitian tersebut menitikberatkan pada peristiwa yang terjadi di Jawa, namun hal itu dapat dijadikan studi lanjut dalam meneliti gerakan Ratu Adil di luar Jawa, terutama di Residensi Jambi.

Penelitian lain yang dapat dijadikan referensi adalah dari Van Wijk, *Opstand in Jambi (19/9)*, yang melihat kondisi sosial ekonomi di Jambi pada awal ke-20 dan juga munculnya konsep mesianisme di Jambi berkaitan dengan gerakan-gerakan sosial seperti gerakan di Huara Teabesi yang dipimpin oleh Haji Agoes.

Tulisan dari Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil (1984)*, dapat membantu menjelaskan mengenai gerakan-gerakan sosial keagamaan pada abad ke-19 dan 20. Dalam tulisan tersebut, Sartono membahas mengenai keresahan dan radikalisme

petani, dimana radikalisme dan keresahan itu sering berkaitan dengan masalah keagamaan. Ia berpendapat bahwa gerakan Ratu Adil tidak dapat dipisahkan dari pemikiran tradisional yang masih memainkan peranan penting dalam perancangan politik pedesaan.

Tulisan penting lainnya yang dapat dijadikan referensi adalah Jang Aisyiyah Muttalib di Prisma, Agustus 1980 dan Taufik Abdulah dalam Prisma, 1989 yang menguraikan peristiwa-peristiwa di Jambi pada awal abad ke-20 dan reaksi masyarakat setempat terhadap kolonisasi di Jambi.

Koleksi arsip yang berupa proses verbal seperti : V.24-7-17-7, mails, 2626/16 yang berisi laporan residen Palembang dan Jambi merupakan sumber bahan penting dan laporan terperinci mengenai gerakan Sarekat Abang (SA) dan juga mengenai keterlibatan Sarekat Islam (SI) dalam gerakan SA dimuat dalam laporan Leifrink, 20 oktober 1917 : Mededeelingen der Regeering Omtrent enkele Onderwerpen Van Algemeen Belang, Vb.17 Januari 1918.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah pergerakan sosial yaitu menelaah gerakan-gerakan sosial di Indonesia dengan memberi penekanan-penekanan pada kekuatan sosial keagamaan yang dapat menggerakkan masa banyak. Banyak gerakan sosial, termasuk kerusuhan sosial, kebingungan massa, pemberontakan dan sektarianisme dapat digolongkan sebagai gerakan sosial keagamaan karena gejala-gejala tersebut pada umumnya cenderung berkaitan dengan gerakan-gerakan yang diilhami oleh agama atau menggunakan cara-cara agama.

Gerakan-gerakan keagamaan pada dasarnya mengandung berbagai aspek atau istilah. Menurut Sartono Kartodirdjo (1984:10), gerakan-gerakan sosial keagamaan mengandung berbagai aspek, yaitu gerakan juru selamat (messianism), milenarianisme, pribumi (nativism), kenabian (prophetism) dan menghidupkan kembali kehidupan asli (revivalism).

Sementara Koentjaraningrat (1990:113-114) menegaskan bahwa gerakan-gerakan sosial keagamaan pada dasarnya mempunyai empat aspek yaitu aspek kenabian, aspek psikologi, aspek Ratu Adil dan aspek keaslian kebudayaan. Penekanan pada salah satu aspek menyebabkan adanya beberapa istilah bagi gerakan-gerakan tersebut. Para sarjana yang tertarik akan aspek kenabian menyebutnya dengan gerakan kenabian (cults). Sarjana-sarjana yang tertarik akan aspek ratu adilnya sering memakai istilah gerak mesianis (messianic movements). Sedangkan para sarjana yang memandang gerakan-gerakan dari aspek keaslian kebudayaan menyebutnya dengan gerakan pribumi (nativistic movement).

Dari kedua pandangan tersebut nampak adanya hubungan yang erat antara sistem sosial dengan keagamaan sehingga di dalam masyarakat muncul gerakan-gerakan sosial yang bersifat keagamaan akibat tekanan dari pemerintah kolonial. Durkheim berpendapat bahwa hubungan komunitas keagamaan dengan sistem sosial yang bersifat timbal balik. Hal ini disebabkan adat istiadat atau sistem sosial dalam tiap kebudayaan merupakan penjelmaan dari faham-faham kolektif atau *representations collectives* yang hidup dalam masyarakat. (Koentjaraningrat, 1985:273). Ditambahkan pula bahwa emosi keagamaan yang muncul dari kelompok masyarakat adalah akibat dari sentimen kemasyarakatan yang ada sehingga solidaritas kelompok menjadi kuat. Tekanan-tekanan sosial yang dialami oleh sebagian masyarakat menjadikan sentimen kemasyarakatan meningkat sehingga dapat memperkuat emosi keagamaan dengan motif dan harapan yang sama.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yang lazim dipakai dalam penelitian sejarah. Dalam metode sejarah, penelitian ini melalui empat tahapan pokok, yaitu : penumpulan sumber atau data (*heuristik*), kemudian seleksi dan kritik sumber, selanjutnya interpretasi dan analisis sampai pada penulisan laporan (*historiografi*). (Louis Ghotschalk, 1975:34).

Dalam pengumpulan sumber maka penelitian ini mengandalkan sumber tertulis karena penelitian ini rentang waktunya pada awal abad ke-20 sehingga sumber tulisan mutlak diperlukan, sementara sumber lisan tidak digunakan karena tidak cukup relevan. Adapun sumber-sumber tertulis yang dipakai adalah sumber dari koleksi arsip, dokumen yang sudah diterbitkan, manuskrip, buku-buku, artikel-artikel di majalah atau surat kabar dan sumber-sumber lain dengan menggunakan studi kepustakaan, diantaranya perpustakaan Nasional, arsip Nasional, perpustakaan Daerah, Perpustakaan Fakultas Sastra dan perpustakaan lainnya.

Tahap kedua adalah seleksi data dan kritik sumber yang terbagi atas dua macam yaitu keaslian sumber atau yang lebih dikenal dengan kritik ekstern dan yang kedua adalah kredibilitas sumber atau kritik intern yaitu tentang kritik isi dari sumber. Data-data sejarah yang diperoleh melalui kritik sumber tersebut dinamakan fakta sejarah.

Tahap ketiga adalah interpretasi dan analisis yaitu merangkai fakta-fakta yang satu dengan fakta-fakta yang lainnya menjadi satu kesatuan yang bermakna sehingga membentuk suatu pengertian yang utuh. Dan akhirnya tahap keempat adalah fakta-fakta sejarah yang telah mempunyai makna tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan atau historiografi secara menyeluruh sehingga membentuk suatu deskripsi sejarah yang bermakna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam gerakan sosial di Jambi pada awal abad ke-20 ini, paling tidak ada tiga faktor yang melatar belakangi munculnya pemberontakan rakyat terhadap pemerintah kolonial, yakni politik, ekonomi dan sosial. Dalam bidang politik, pemerintah kolonial mengadakan perombakan total terhadap struktur pemerintahan baik dari tingkat atas sampai bawah. Sedangkan pemerintahan kesultanan Jambi dihapuskan dan juga jabatan kepada daerah yang dulunya dipegang oleh para anak raja atau kaum bangsawan sudah tidak diberikannya.

Hal ini berarti telah menghapuskan konsep pemerintahan tradisional yang telah berabad-abad lamanya dianut oleh rakyat Jambi. Bagi rakyat Jambi, pemerintahan kolonial dianggap sebagai pemerintahan kafir, yang tidak dapat mengganti kedudukan Sultan sebagai pelindung dan pemelihara adat dan agama.

Jabatan terendah di dalam hirarki kepegawaian pemerintahan kolonial yang dipegang oleh bangsa Belanda adalah Jabatan *contraleur*. Sebagai pejabat pemerintah kolonial tertinggi di Jambi pada tahun 1901 diangkat seorang asisten residen yang pada waktu itu bertanggung jawab kepada residen di Palembang, namun pada tahun 1906 Jambi menjadi satu keresidenan yang terlepas dari Palembang. Didalam residensi Jambi ada enam jabatan demang dipegang oleh orang bumiputera yang berpendidikan Barat. Oleh karena pada waktu itu jarang sekali orang Jambi yang berpendidikan Barat maka jabatan demang didatangkan dari luar Jambi, seperti Padang, Palembang dan Jawa (Jang Muttalib, 1980:28).

Tugas dari demang ini meliputi berbagai hal seperti menyelidiki perkara kriminal dan melakukan penangkapan, mengawasi kerja rodi, mengawasi jenis-jenis tanaman yang dikehendaki pemerintah. Sehingga tidak mengherankan kalau rakyat setempat tidak menyenangi para demang dan dianggap sebagai kaki tangan pemerintah. Bahkan banyak para demang ini seakan-akan menjadi kontrolir kecil, karena *controlleur* Belanda biasanya menjabat hanya untuk beberapa waktu saja.

Kekuasaan politik pemerintah kolonial ini diikuti oleh perubahan lahan di bidang ekonomi. Sehingga di residensi Jambi mengalami perubahan dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi kolonial. Pada tahun 1904 pemerintah kolonial mulai mengusahakan tanaman perkebunan, seperti : damar, rotan dan karet untuk komoditi ekspor. Bahkan tanaman karet mencapai "boom" pada tahun 1912 sehingga dikenal dengan demang karet karena hasil ekspor karet ini sangat laku di pasaran internasional. Sehingga mulailah penduduk menanam karet bahkan melalaikan penanaman padi.

Perkebunan-perkebunan karet percobaan pemerintah kolonial mula-mula dikerjakan oleh *dwangarbeiders* (tahanan yang menjalani hukuman kerja paksa) kemudian diganti dengan



menggunakan tenaga *heerediensten* (kerja wajib negara). Pada tahap permulaan usaha pengembangan ekonomi di Jambi ini menggunakan cara halus melalui struktur administrasi yang bersifat hirarkis (Jang Muttalib, 1980 : 29).

Kemiskinan perkebunan karet di Jambi dikuasai oleh orang-orang Cina, Eropa dan bumiputera yang berasal dari luar Jambi, sementara orang setempat sendiri hanyalah pekerja upah saja di perkebunan-perkebunan tersebut. Rakyat disuruh untuk menanam karet, sementara penanaman padi sudah ditinggalkan sehingga waktu antara 1912 sampai 1916 merupakan masa-masa yang sulit bagi rakyat Jambi. Pada tahun-tahun itu merupakan tahun panen gagal sehingga timbul malaise ekonomi. Akibatnya rakyat hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sedangkan pemungutan pajak terus diberlakukan dan siapa saja yang tidak membayar pajak akan dikenai hukuman kerja rodi. Dalam kondisi yang serba sulit, justru pemerintah kolonial menaikkan pajak. Sehingga di beberapa daerah muncul perlawanan-perlawanan kecil menentang kebijaksanaan pemerintah.

Di Bidang sosial, seperti sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan juga mengalami pertentangan-pertentangan. Di mata rakyat Jambi pendidikan Barat (pemerintah kolonial) dianggap sebagai pendidikan kafir yang akan menjadikan anak-anak mereka kakai tangan kaum kafir seperti halnya *pra demaang* yang mereka kenal.

Selain penolakan terhadap sistem pendidikan, rakyat Jambi juga menolak adanya pelayanan kesehatan dari pemerintah kolonial. Dalam hal inipun pemerintah kolonial juga harus memakai cara pemaksaan dan kekerasan. Ketika wabah penyakit kolera menyerang Jambi pada tahun 1910, petugas kesehatan meminta bantuan polisi dan demang untuk melaksanakan karantina, pembakaran baju-baju dan barang-barang lain kepunyaan mereka yang sakit. Walaupun sudah ada pemaksaan dari pemerintah kolonial, namun masih banyak rakyat Jambi yang menolaknya. Bagi kepercayaan rakyat Jambi munculnya wabah penyakit bukan diakibatkan fisik seseorang tetapi kemarahan yang kuasa atau kekuatan supranatural. Munculnya wabah penyakit kolera tersebut diyakini oleh rakyat Jambi karena adanya ketidakserasian antara kehidupan manusia dengan Sang Pencipta. Hal ini juga dipertegas dengan gagalnya panen padi sumber dari segala malapetaka tersebut adalah kehadiran pemerintah kolonial yang merombak tata kehidupan rakyat Jambi (Jang Muttalib, 1980:30).

Sebelum pemberontakan tahun 1916 meletus, muncul beberapa perlawanan-perlawanan dalam lingkup yang lebih kecil, seperti pemberontakan di Sarolangun dan Muara Tembesi pada tahun 1910. Pemberontakan ini dipimpin oleh Alam Bidar yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Alam Bidar ini sebenarnya adalah seorang pemuda desa biasa, yang setiap hari juga mengaji dan belajar agama seperti halnya teman sebayanya. Alam Bidar mengakui bahwa ia sering memasuki roh

halus, sehingga dianggap oleh masyarakat setempat sebagai orang keramat. Lebih-lebih ketika pada tahun 1909 Alam Bidar dikaitkan oleh gurunya Haji Latif sebagai Imam Mahdi. Setelah menerima ilmu-ilmu dari gurunya tersebut, reputasi Alam Bidar semakin bertambah. Semanjak itu, ia mengajarkan dan mengajak rakyat setempat untuk tidak lagi membayar pajak dan tidak melakukan kerja wajib. Alam Bidar juga menyerukan kepada penganutnya untuk tidak berpakaian dan memakai topi seperti orang kafir. Dan bahkan ia mengatakan bahwa pemerintah kafir akan berakhir dalam waktu 7 bulan (Jang Muttalib, 1980:31). Alam Bidar dan pengikutnya telah mempersiapkan perang suci terhadap kekuasaan pemerintah kolonial. Pra-pengikutnya melakukan persiapan-persiapan untuk penyerangan, termasuk dengan pengisian kekebalan tubuh. Pemberontakan akan dimulai pada saat penyerahan pajak atau waktu pemanggilan untuk melakukan kerja rodi (Korver, 1985:84).

Kemudian pada tahun 1914 terjadi lagi suatu gerakan anti kafir di Bangko. Pemimpin gerakan ini adalah Kademangan Ali, yang tujuannya untuk membebaskan rakyat Jambi dari penjajah kafir. Kademangan Ali sendiri dapat meloloskan diri tetapi pada akhir tahun 1914, ia dibunuh oleh pasukan kolonial (Jang Muttalib, 1980:32).

Pemberontakan yang jauh lebih luas dan besar terjadi tanggal 26 Agustus 1916 di Muara Tembesi (Korver, 1985:84). Sebelum pemberontakan tersebut meletus, di Jambi telah berdiri organisasi Sarekat Islam (SI) yang dipelopori oleh raden Goenawan dari Sarekat Islam pusat pada tahun 1914. Raden Goenawan adalah nama pemimpin SI yang penuh dengan kharismatik dan dikagumi oleh rakyat Jambi.

Dalam waktu yang singkat, organisasi ini telah memperoleh bupati yang banyak, kurang dari 3 bulan SI di Jambi berhasil menarik massa lebih dari 2 ribu anggota. (Jang Muttalib, 1980 : 33). Mengingat begitu banyaknya massa yang ingin menjadi anggota SI, maka oleh pemerintah kolonial melalui residen Jambi membekukan penerimaan anggota SI tersebut. Meskipun dibekukan oleh pemerintah, namun beberapa calon anggota dari daerah pedalaman masih menunggu untuk diambil sumbahnya. Kemudian mereka secara diam-diam pergi ke Rawas untuk menjadi anggota SI.

Perlu dicatat bahwa ada dua Sarekat Islam di Jambi pada waktu itu. Yang pertama SI sebagai organisasi yang lebih bergerak dalam usaha memperbaiki kondisi sosial ekonomi golongan bumiputra. Organisasi SI ini berada di daerah Muara Tembesi dan Bangko. Sebaliknya, organisasi SI yang dipedalaman Rawas merupakan organisasi yang radikal dan anti pemerintah kolonial. Ide radikal ini berasal dari "ilmu abang" sehingga SI Rawas ini dipedalaman ini dikenal dengan nama Sarekat Abang (SA). Ilmu abang ini mengandung ajaran Sufi dan mistik dari berbagai aliran, seperti Sammaniyah dan Naksabandiyah dan juga ajaran-ajaran ilmu Kebal. Ilmu kebal ini berlandaskan pada ajaran bahwa setiap manusia mempunyai

kekuatan dalam dirinya yang menyebabkan ia menjadi kebal. Kekuatan itu baru dapat muncul dan menjadi efektif jika diusaka manusia dengan bantuan kekuatan di luar manusia dan dengan usaha manusia sendiri. Penguatan ilmu ini juga harus mengikuti prosesi upacara. Upacara dilakukan pada waktu malam hari di suatu tempat di luar perkampungan. Pada waktu itu anggota diuji apakah kekuatan tenaga dalamnya sudah cukup. Dan kemudian setiap anggota harus bersumpah untuk memerangi pemerintah kolonial yang kafir. (Jang Muttalib, 1980:33).

Motor penggerak dalam pemberontakan tahun 1916 di Jambi adalah Sarekat Abang (SA) Sarekat Abang ini merupakan suatu terekat yang bersifat mistik dengan corak gerakannya megianisme selain bersifat mistik. Sarekat Abang ini juga melatih para anggotanya di bidang seni bela diri dan kekebalan untuk memperoleh kekuatan gaib.

Sarekat Abang ini sebelum tahun 1916 sudah menyebar ke berbagai daerah, termasuk Jambi dan Palembang. gerakan yang dipimpin oleh Glambit di Rawas juga termasuk ke dalam Sarekat Abang. Masyarakat Rawas sendiri juga sangat kagum atas pidato-pidato yang dibawakan Glambit. Ia menyatakan bahwa perenag sabil atau perang melawan pemerintah kafir, bagi setiap anggota hukumnya wajib. Bagi siapa yang tidak ikut berperang akan dipandang lehernya. Glambit sendiri mengaku bahwa dirinya sebagai wali Imam Mahdi dan wakil dari Raden Goenawan. (Staoufik Abdullah, 1984:24).

Anggota Sarekat Abang banyak tersebar di daerah pedalaman Jambi dan Palembang. Terutama di daerah Rawas, para pemimpin Sarekat Islam (SI) setempat sekaligus menjadi anggota Sarekat Abang dan mempunyai peranan aktif dalam pemberontakan. Sementara di tempat lain seperti di Muara Tembesi dan Bangko, kader Sarekat Islam justru organisasi untuk kesejahteraan anggotanya. Oleh sebab itu, Sarekat Islam di Muara Tembesi dan Bangko di namakan oleh Sarekat Sarekat Abang dengan istilah Sarekat Kompeni. (Khorver, 1985:85). karena sifatnya yang kooperatif terhadap pemerintah kolonial.

Ketua cabang Sarekat Islam Muara Tembesi, Haji Agnes, diancam dan dipaksa bergabung dengan Sarekat Abang ia diangkat menjadi kepala urusan agama kerajaan baru yang meraka bentuk dan dijadikan wakil raja baru. Selanjutnya Haji Agnes diperintahkan agar semua penduduk Muara Tembesi masuk ke dalam anggota Sarekat Islam yang lebih bersifat non kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Di Muara Tembesi ini, gerakan Sarekat Abang sebagai barisan terdepan untuk menyerang pemerintah kafir, sementara Sarekat Islam sebagai gerakan massa pendukung Gerakan Sarekat Abang ini telah memanfaatkan organisasi Sarekat Islam sebagai tameng untuk mengadakan pemberontakan.

Sejak akhir tahun 1915 keadaan di Jambi terus menghan-

kekecilaan-kecilaan yang memusaukan, oleh karena semua kegiatan dilakukan secara rahasia dan menggunakan bahasa sandi. Para pemimpin Sarekat Abang yang berada di pedalaman memberikan isyarat epada rakyat Jambi untuk bersiap-siap oleh karena perlawanan-perlawanan akan serentak dilakukan pada tanggal 13 Oktober 1916 (Jang Nuttallin, 1960:34).

Untuk mengadakan perlawanan tersebut, para pemimpin Sarekat Abang mengharapkan bantuan dari pemimpin Sarekat Islam pusat, yaitu Raden Goenawan. Oleh karena nama Raden Goenawan, di seluruh residensi Jambi dan juga Palembang sebagai wakil raja dari Turki, bahkan selain seorang pemimpinnya, yaitu Daulahid menamakan dirinya sebagai wakil raden Goenawan. (Korver, 1965:66).

Sebenarnya Daulahid sendiri adalah seorang penyadap karet. Ia adalah seorang pukulan yang pada waktu itu baru melarikan diri dengan terjun dari kapal yang akan membawanya ke Batavia. Mula-mula ia mengaku sebagai raden Goenawan dan kemudian berganti nama sebagai raja Melayu. Daulahid terpaksa berganti-ganti gelar oleh karena beberapa pemimpin lain mulai memakai nama tokoh sejarah yang dianggap lebih tinggi derajat legitimasinya, seperti Sultan Ians atau Pangeran Ratu (Jang Nuttallin, 1960:35).

Pada umumnya di daerah-daerah, Raden Goenawan dianggap sebagai semacam juru selamat. Hal ini ditandai, ketika ia berkeliling daerah di seluruh Sumatera Selatan dan Jambi disambut dengan penghormatan yang berlebihan oleh rakyat. Baik pria maupun wanita, tua maupun muda berdesak-desakan untuk memeluk baksian dan berjabat tangan, bahkan jika baksian ataupun pimpinan dari Raden Goenawan dianggap oleh rakyat mempunyai keahlian, ketika tujuan Raden Goenawan sudah dianggap sebagai orang selamat, yang dianggap sebagai wali Allah.

Revolusi sebagai pemberontakan dilaksanakan tanggal 13 Oktober 1916, namun keayatanannya pemberontakan diadisi di mana-mana. Pemberontakan pada tanggal 15 September 1916 (Korver, 1965:66). Kemudian serentak di seluruh daerah-daerah lain. Tetapi perlawanan-perlawanan ini tidak dilakukan secara serentak. Hal ini dengan alasan membolehkan tidak adanya koordinasi dari serentak tersebut. Sehingga dengan mudah serentak tersebut dapat dipadamkan oleh pemerintahan Kolonial. Bahkan di pulau Sumatra sama sekali tidak sempat berkecamuk oleh karena tindakan keras dari Controleur pemerintah kolonial yang memerintahkan supaya pemimpin pemberontakan dan diawasi hukuman mati.

Pada waktu itu, para pemberontak menyerang tanggal polisi, mereka memukul penjara serta memusnahkan pos dan rumah pejabat Belanda. Mereka temosi jadi kancan pemberontakan pada malam itu.

Sesudah serbuan tersebut, para pemimpin pemberontakan mulai menghimpun pengikutnya lebih banyak lagi. Yang bertekad masuk ke dalam kelompok ini disambut dengan restu, dan mereka yang tidak mau ikut akan dicap sebagai musuh. Dari 28 Agustus sampai 2 September 1913, tidak kurang dari 886 orang yang ikut berikrar di dalamnya. (Taufik Abdillah, 1984:24).

Dari Muara Tembesi, kerusuhan kemudian menyebar dengan cepat sekali ke bagian lain daerah pedalaman Jambi. Pada awal September 1916 pos-pos pemerintahan di Muara Tebo, Sarolangun dan Bangko diserbu serta di Rawas, yang berbatasan dengan daerah Palembang terjadi kekacauan. Pemberontakan-pemberontakan ini menganggap perjuangan mereka sebagai bagian perang suci melawan kaum kafir. Bagi mereka, semua orang asing dan bukan islam harus dibunuh. Mereka yang turut serta dalam pertempuran tersebut dianggap telah berjihad dan apabila mereka tewas dalam peperangan akan masuk surga. (Korver, 1985:85).

Pada bulan Oktober 1916 berakhirilah riwayat pemberontakan, dan akhir Desember semua yang dipandang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu harus ditangkap. Pemberontakan tersebut membuat pemerintahan kolonial kehilangan seorang controleur, sembilan pegawai pemerintah bumi putera, dan 63 orang polisi. Di pihak Jambi, jumlah yang tewas adalah 360 orang. Akibat dari pemberontakan itu, pihak penguasa pemerintah kolonial telah menjatuhkan hukuman mati 76 orang, 324 orang dikenakan hukuman 20 tahun kerja rodi, 264 dan 345 orang dikenakan hukuman masing-masing 15 tahun dan 10 tahun. (Taufik Abdillah, 1984:26). Walaupun pemerintahan tersebut dapat dipadamkan dalam waktu dua bulan, namun hal itu menjadi suatu tantangan yang serius terhadap pemerintahan kolonial sehingga harus ditinjau kembali kebijaksanaan politiknya di daerah-daerah.

## KESIMPULAN

Jika kita perhatikan, semua perlawanan di Jambi pada awal abad ke-20 mengandung unsur mesianisme, seperti halnya dengan pemberontakan-pemberontakan di Jawa. Mesianisme sendiri adalah suatu gerakan atau orang yang percaya akan datangnya sang juru selamat ke muka bumi. Mesianisme diambil dari kata mesias yang artinya adalah ajaran menunggu sang juru selamat, yang diharapkan dapat memberikan keselamatan baik spritual maupun material bagi umat manusia. Mereka menanti kedatangan ratu adil, imam mahdi atau juru selamat lainnya.

Dalam gerakan mesianistik yang tidak disertai oleh organisasi yang efisien maka keberhasilannya sangat tergantung pada kepribadian pemimpinnya. Mereka tidak harus merupakan pemimpin eskatologis tetapi harus kharismatis. Pemimpin yang kharismatis erat kaitannya dengan banyaknya pengi-

kut dan tinggi rendahnya derajat loyalitas mereka. Sifat Kharismatis pemimpin-pemimpin pemberontakan di Jambi cukup menonjol hanya saja reputasi mereka terbatas dimana mereka tinggal.

Walaupun terdapat persamaan yang pokok antara beberapa gerakan sosial di Jambi sebelum dan sesudah pemberontakan tahun 1916, namun terdapat juga perbedaan pokok. Pemberontakan tahun 1916 telah mengenal seorang pemimpin yang mempunyai reputasi keluar daerah. Dalam hal ini juga telah dikenal ide solidaritas yang lebih luas yaitu tidak saja mencakup Jambi tetapi juga Palembang, Bengkulu, Jambi dan Jawa.

Kelemahan pemberontakan di Jambi adalah adanya persaingan kepemimpinan yang tertinggi dengan legitimasi yang kuat. Pemimpin-pemimpin ini berasal dari segala lapisan seperti buruh di perkebunan karet, guru agama atau guru tarekat, kepala dusun, petani biasa ataupun keturunan bangsawan Jambi. Tidak adanya seorang pemimpin yang kuat ini disebabkan oleh karena pemimpin-pemimpin yang muncul mewakili kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda. Misalnya, golongan bangsawan ataupun para guru agama tidak dengan mudah menerima seorang pemimpin yang bernama Dulahid sebagai raja Melayu atau Imam Mahdi. Golongan bangsawan tentu saja beraspirasi mengembalikan struktur pemerintahan tradisional ke posisi yang semula.

Meskipun demikian pola-pola dalam gerakan sosial di Jambi pada awal abad ke-20 pada dasarnya terdapat kesamaan yaitu munculnya seorang pemimpin yang dianggap suci dengan pengikut-pengikut setianya dan juga menggunakan cara-cara agama. Mereka mengaku memperoleh wahyu dan kemudian mulai menjalankan peranan sebagai Ratu Adil atau Imam Mahdi. Di samping itu adanya pengharapan dalangnya masa keemasan yang diyakini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Manifestasi dari gerakan-gerakan sosial di Jambi merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang menuntut perhatian kalangan luas secara bersama. Dengan mempelajari gerakan-gerakan sosial ini diharapkan akan berguna bagi pemerintah sebagai pengambil kebijaksanaan untuk memahami gejala-gejala sosial keagamaan yang muncul di masyarakat. Walaupun kelihatannya semata-mata bersifat kelompok sosial ataupun keagamaan namun tidak jarang ada unsur-unsur politis yang mengandung provokasi dan sangat berbahaya bagi pemerintah yang ada. Oleh karena itu perlu dicermati oleh pemerintah.